

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dan Kecamatan Selomerto.

A. Alokasi Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan perindustrian, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 2.555.056.200,-** dari alokasi tersebut terealisasi sebesar **Rp 2.509.741.115,-** atau 98,22% dari rencana atau 0,13% dari total alokasi belanja APBD Tahun 2017 yang sebesar Rp 2.000.613.704.761,-. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.D.5.1**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian Tahun 2017**

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	2.555.056.200	2.509.741.115
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.855.000	389.309.134
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.201.200	134.872.981
3	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.195.000.000	1.190.190.000
4	Penataan Struktur Industri	45.000.000	45.000.000
5	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	590.000.000	587.325.000
6	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	155.000.000	153.044.000
7	Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi local	10.000.000	10.000.000
B	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Pegawai		
	Jumlah Total	2.555.056.200	2.509.741.115

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

B. Realisasi Program dan Kegiatan**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan memberdayakan dan mengembangkan industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terutama perluasan kesempatan kerja. Dengan sasaran tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing dan meluasnya diversifikasi jenis produk.

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, studi banding sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk, akses pasar dan kemitraan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

- a. Pelatihan Wirausaha baru Kerajinan Souvenir (DBHCHT).
Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan skill / ketrampilan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuan yang diminati. Pelatihan wirausaha baru kerajinan souvenir dilaksanakan tanggal 25 s.d 29 November 2017 selama 5 hari bertempat di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
- b. Pelatihan dan Pengembangan Pembuatan Bakery dan Roti Kering (DBHCHT)
Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan ketrampilan dan kemampuan manajerial pelaku industri bakeri dan roti kering guna meningkatkan daya saing produk. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 s.d 24 Maret 2017 untuk pelatihan bakery dan pada tanggal 27,29 dan 31 Maret 2017 untuk pelatihan roti kering dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
- c. Pelatihan Ketrampilan Produk Aneka Makanan Memanfaatkan Bahan Baku Lokal (DBHCHT).
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan SDM dalam mengolah bahan baku lokal (singkong dan rebung) guna meningkatkan nilai tambah produk. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Aula Kecamatan Sapuran 17 s.d 20 April 2017 dengan jumlah peserta 40 orang dan di Pondok Lifeskill Jamuniro dengan jumlah peserta 40 orang.
- d. Fasilitasi Badan Hukum Kelompok IKM (DBHCHT).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi guna meningkatkan kualitas kelembagaan industri kecil yang diikuti oleh 68 IKM. Pada tanggal 15

Agustus 2017 dilakukan dengan memberikan fasilitasi pendaftaran produk dan Sertifikasi Badan Hukum IKM.

- e. **Pengembangan dan Pelatihan Teknologi Industri Teralis (DBHCHT)**
Pada kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pelaku industri kecil teralis logam yang telah dilakukan pada tanggal 17 s.d 20 April 2017 yang bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Makan Sindoro Sumbing Kecamatan Kertek dengan 30 pelaku industri kecil teralis di Kabupaten Wonosobo.
- f. **Pelatihan Ketrampilan Ukir Pasir Besi dan Kerajinan Bambu (DBHCHT)**
Kegiatan ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan teknis pelaku industri kecil ukir pasir besi dan kerajinan bambu. Berlokasi di Desa Beran Kecamatan Kepil pada tanggal 8 s.d 11 Mei 2017 dengan 30 pelaku industri kecil ukir pasir besi dan kerajinan bambu.
- g. **Pengembangan Produk Berbasis Ekspor (DBHCHT).**
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing produk yang berorientasi ekspor yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Kecamatan Kepil dengan 30 peserta pelaku industri berbagai sentra.
- h. **Kemitraan IKM dengan Pasar Modern**
Pada kegiatan ini diperlukan guna memfasilitasi bagi pelaku industri kecil untuk mengakses pangsa pasar yang lebih luas. Kegiatan ini mempertemukan antara pelaku industri modern dengan para pengusaha IKM agar terjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Pertemuan dilakukan di Jakarta pada bulan Mei 2017 dengan 30 pelaku industri kecil.

4. Program Penataan Struktur Industri

Program ini hanya meliputi satu kegiatan yang berhubungan dengan urusan Perindustrian, yaitu penyusunan naskah raperda. Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan pembangunan industri di wilayah Kabupaten Wonosobo agar menjadi tolak ukur, berkesinambungan dan ramah terhadap lingkungan serta mengakses masyarakat luas terutama tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bentuk kegiatan ini adalah naskah akedemis raperda rencana pembangunan industri di Kabupaten Wonosobo. Tersusunnya raperda tersebut sebagai hasil kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, sehingga dapat menjadi peraturan yang dapat dipatuhi bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk mengembangkan sentra-sentra industri yang memiliki potensi untuk dapat berkembang bahkan maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Selain itu, pengembangan sentra industri ini dilakukan dengan analisis potensi setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dalam melaksanakan urusan perindustrian, didukung oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Peningkatan Ketrampilan dan Pengembangan Industri Kecil Batik**
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku industri batik. Dengan 20 pelaku

industri kecil batik, peningkatan ketrampilan dan pengembangan industri sentra ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 26 Mei 2017.

- b. Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil, Menengah Kerajinan Bambu Kayu dan Tempurung Kelapa (DBHCHT)
Pada pelatihan ini dilaksanakan di Desa Warangan Kecamatan Kepil dan Pondok Lifeskill Jamuniro dengan pelatihan pemanfaatan potensi bambu, kayu dan tempurung kelapa guna dijadikan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kegiatan ini melatih sebanyak 40 orang peserta yang dilakukan pada 2 kali yaitu pada tanggal 17 s.d 20 Juli 2017 di Pondok Lifeskill Jamuniro dan pada tanggal 25 s.d 28 Juli 2017 di Desa Warangan Kecamatan Kepil.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Carica (DBHCHT)
Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kaedah - kaedah *Good Manufacturing Practices* pada produksi carica. Melalui dua kali kegiatan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 bertempat di Rumah Makan Cemara Tujuh dan tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Makan Sarirasa dengan total peserta 100 produsen yang memiliki industri kecil Carica.
- d. Pelatihan Pembuatan Manisan Salak Kecamatan Sukoharjo (DBHCHT)
Kecamatan Sukoharjo mempunyai potensi hasil pertanian pada buah salak, oleh karena itu kegiatan ini melakukan pelatihan pembuatan manisan salak agar nilai ekonomisnya lebih tinggi sehingga dapat mensejahterakan pendapatan masyarakat. Dilaksanakan pada tanggal 7 dan 12 Agustus 2017 dengan total peserta 60 orang.
- e. Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Gula Kelapa dan Gula Tebu (DBHCHT)
Selain bambu, kayu dan tempurung kelapa, Kecamatan Kepil memiliki potensi lainnya dalam hasil pertanian gula kelapa dan gula tebu. Bertempat di Desa Beran Kecamatan Kepil, pelatihan pengolahan gula ini dihadiri oleh 50 peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat yang ingin meningkatkan produk olahan tebu dan kelapa.
- f. Pengembangan IKM di Kawasan Agropolitan (DBHCHT)
Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas kemasan pada IKM Agropolitan. Pelatihan IKM ini dikhususkan pada pelatihan pembuatan kemasan. Kegiatannya adalah melakukan studi banding dan mempraktekkan pembuatan kemasan di Rumah Kemasan, Kota Batu, Jawa Timur dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dengan yang tersebar di wilayah Rojonoto (Kaliwiro, Seukoharjo, Leksono dan Selomerto).

6. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Salah satu isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah masalah hubungan industri dan perlindungan hak-hak buruh/pekerja. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ketenagakerjaan, salah satunya ditujukan pada upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja dimaksudkan untuk memberi kontribusi nyata pada upaya pencapaian tujuan tersebut di atas.

Program ini dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja. Rincian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

a. **Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Kegiatan ini dilakukan mengingat perlunya fasilitasi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dilaksanakan guna memastikan bahwa pekerja diperlakukan secara adil, dan berada pada kedudukan setara dengan pengusaha, serta meningkatkan keadilan bagi pekerja dan perusahaan. Pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi dan mediasi.

Sosialisasi dan mediasi yang dilakukan meliputi kegiatan :

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Penyuluhan Penyelesaian Hubungan Industrial.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan, membentuk sarana hubungan industrial di perusahaan, memberi pemahaman tentang sistem pengupahan di perusahaan, fungsi kelembagaan K3 di perusahaan, dan mendorong terbentuknya lembaga K3 di perusahaan;

- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam kegiatan ini selain dilakukan sosialisasi, juga dilaksanakan penanganan kasus perdata PHI/PH

b. **Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan guna mendorong seluruh tenaga kerja mendapatkan jaminan sosial. Penyelesaian Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan penyelesaian klaim. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan prosedur penyelesaian klaim BPJS. Melalui kegiatan ini pekerja dapat kerja memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta tidak mengalami kesulitan ketika mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan, Selain itu juga dilakukan fasilitasi dan pendampingan kepada tenaga kerja yang mengalami kesulitan dalam proses klaim JHT (Jaminan Hari Tua) Ketenagakerjaan.

c. **Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja**

Kegiatan Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja merupakan kegiatan untuk memfasilitasi permusyawaratan dan konsultasi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah dalam rangka meminimalkan perselisihan hubungan industrial melalui penciptaan

III.D.5. Urusan Pilihan Perindustrian

hubungan yang harmonis antara ketiganya. Upaya ini akan berimplikasi terhadap iklim investasi Kabupaten Wonosobo. Pada kegiatan ini meliputi;

- Sidang- sidang yang diadakan oleh LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja;
- Fasilitasi Peringatan Hari Buruh;
- Sosialisasi Penerapan Struktur Skala Upah yang dimaksudkan untuk melatih perusahaan terutama pada bagian HRD agar dapat memberikan implikasi pada upah pekerja yang disesuaikan dengan lama bekerja, jenis pekerjaan dan berat pekerjaan
- Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dan Sosialisasi UMK Tahun 2019; Sosialisasi peningkatan kapasitas Lembaga Kerja Sama Bipartit.

C. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Tabel IV.D.5.2
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2016	2017**
1	Kontribusi sektor industri thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri) / (Jumlah total PDRB)x100%	$\frac{2.540.702,68}{15.365.351,61} \times 100\% = 16,54\%$	$\frac{2.758.586,47}{16.393.517,47} \times 100\% = 16,83\%$
2	Pertumbuhan industri (Jumlah industri tahun 2017 - Jumlah Industri tahun 2016) / Jumlah industri sampai tahun 2017) x 100%	$\frac{17.708 - 17.172}{17.172} \times 100 = 3,12\%$	$\frac{17.928 - 17.708}{17.708} \times 100 = 1,24\%$

D. Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, BPS (2017)

E. **) data sangat sementara

F.

Capaian kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yang pada tahun 2017 rata-rata menyumbang 16,83%. Jika dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan 0,29%. Sementara untuk pertumbuhan industri pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,88 % dibandingkan tahun 2016.

Penurunan pertumbuhan industri ini disebabkan berkurangnya jumlah industri informal yang produktivitasnya belum begitu tinggi sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sehingga di satu sisi kontribusinya mengalami peningkatan tetapi di sisi lain pertumbuhan industri mengalami penurunan.

III.D.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan kualifikasi usahanya, terdapat lima kualifikasi industri, yaitu industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, serta industri logam. Industri pangan khususnya olahan makanan dan minuman masih menjadi andalan di Kabupaten Wonosobo. Sampai pada tahun 2017 jumlah unit usahanya mencapai 14.540 unit atau sebesar 82,11%. Sebagian besar dari industri pangan tersebut merupakan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Hal ini tidak mengherankan karena Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang kaya dengan hasil pertanian yang unggul, seperti singkong yang dapat diolah menjadi beraneka jenis makanan ringan, carica yang merupakan produk khas Kabupaten Wonosobo.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, industri pangan juga masih mendominasi. Industri pangan menyumbang kontribusi 69,81%, disusul usaha kerajinan yang menyumbang serapan tenaga kerja sebesar 19,98%. Demikian pula dari segi nilai produksi, industri pangan memberikan sumbangan yang terbesar.

Data di atas menunjukkan bahwa dilihat dari jumlah unit usaha, industri di Kabupaten Wonosobo terus mengalami pertumbuhan. Hal ini berarti sektor industri akan terus memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, walaupun di sisi lain kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih berkutat pada kisaran angka 16%. Hal ini menuntut adanya upaya pengembangan dan inovasi agar sektor ini memberi nilai tambah yang semakin besar terutama bagi pelaku industri yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah. Pengembangan sentra-sentra menjadi klaster industri merupakan salah satu pilihan jalan yang diambil, sebab dengan pengembangan ini diharapkan akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi kolektif serta mendorong terciptanya inovasi. Antara lain klaster carica, klaster gula jawa, klaster batik, klaster singkong, sentra opak, sentra tralis dan lain-lain.

Berikut adalah data capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2017 berdasarkan dengan indikator RPJMD 2016-2021 di Kabupaten Wonosobo

Tabel III.D.5.2
Capaian kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017
berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Pertumbuhan industri kecil (%)	3,12	5,65	5,5	97,35	→
2	Pertumbuhan industri menengah(%)	0%	4%	0	0,00	↓
3	Pertumbuhan industri besar (%)	0	0	0	0,00	↓
4	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	250%	4,00%	2,33%	58,25	↓

III.D.5. Urusan Pilihan Perindustrian

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
5	Persentase industri kecil yang berijin	62,00%	70,00%	59,53%	85,04	↓
6	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	3,24%	6,00%	-2,78%	-46,33	↓
7	Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas	11%	25%	1,24%	4,96	↓
8	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	0%	8%	40,00%	500,00	○
9	Persentase klaster yang memiliki SOP	33%	40%	40,00%	100,00	○
10	Persentase kenaikan jumlah klaster	0,3333	20%	20,00%	100,00	○
11	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	3,75%	6,00%	2,61%	43,50	↓
12	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	3,23%	6,00%	0,57%	9,50	↓
13	Jumlah produk yang berstandar nasional	1	1	1	100,00	○
14	Jumlah produk yang berstandar internasional	1	0	0,88%	0,00	↓
15	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	30%	40%	0,19%	0,48	↓
16	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	4,2	4,4	4,34	98,64	→
17	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	3	4	3	75,00	↓
18	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	0,02	10%	6,00%	60,00	↓
19	% IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	0,0675	7,25	4,37	60,28	↓

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

Keterangan Status Capaian

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, setidaknya terdapat 19 indikator capaian kinerja. Guna mencapai target kinerja tersebut, didukung dengan 6 program yaitu Program

III.D.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Sentra Industri Potensial, Program Pengembangan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi, Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal, dan Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri.

Dilihat dari indikator pertumbuhan industri kecil, capaian indikator ini adalah sebesar 5,5%. Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri 2,33%. Persentase industri kecil yang berijin 59,53%. Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas 1,24%. Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju 40%. Persentase klaster yang memiliki SOP 40%. Persentase kenaikan jumlah klaster 20%. Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial 2,61%. Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra) 0,57%. Jumlah produk yang berstandar nasional 1. Jumlah produk yang berstandar internasional 0,88%. Persentase merk produk industri bersertifikat halal 0,19%. % IKM yang memperoleh sertifikasi *good manufacturing product* 4,34.

Guna meningkatkan daya saing industri daerah, serangkaian upaya dilakukan antara lain adalah sertifikasi produk, baik sertifikasi halal, sertifikasi *good manufacturing product*, serta pemenuhan standar nasional maupun internasional. Dengan memenuhi standarisasi sistem produksi akan membeli nilai lebih bagi suatu produk. Untuk itu indikator pada Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi, ditetapkan empat indikator, yaitu : Jumlah produk berstandar nasional, jumlah produk berstandar internasional, presentase merk produk bersertifikat halal, dan persentase IKM yang memperoleh sertifikasi *good manufacturing product*. Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator produk berstandar nasional, baru terdapat 3 produk berstandar nasional bersertifikat SNI, sementara produk berstandar internasional belum ada.

G. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan perindustrian dan upaya yang dilakukan antara lain :

Tabel III.D.5.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Perindustrian

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang dilakukan
1.	Lemahnya daya saing industri lokal	o Meningkatkan daya saing produk IKM dengan fasilitasi pelatihan-pelatihan teknik produksi dan kewirausahaan.
2.	Lemahnya kelembagaan industri yang didominasi oleh IKM	- o Pelatihan pengelolaan industri - o Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan memfasilitasi pertemuan antara IKM dengan CSR perusahaan, dan Fasilitasi permodalan - o Promosi produk unggulan skala regional,

III.D.5. **Urusan Pilihan Perindustrian**

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang dilakukan
		nasional maupun internasional serta memanfaatkan setiap event pameran untuk menjaring pasar yang lebih luas melalui kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha antara IKM dan BUMN sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi wilayah.
3.	Lemahnya struktur industri	○ Mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai industri unggulan dengan mengelompokkannya menjadi suatu klaster bisnis unggulan dengan memanfaatkan inovasi teknologi sehingga mampu memproduksi dalam skala besar dengan biaya yang efisien, serta bisa melakukan penjualan secara rutin dan berkelanjutan. ○ Memperkuat struktur industri terutama industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Lebih utamanya pada agroindustri.
4.	Lemahnya kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan	○ Peningkatan kapasitas pelaku industri terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan
5.	Lemahnya inovasi dan diversifikasi produk	○ Pengembangan inovasi produk ○ Pelatihan inovasi dan diversifikasi produk